PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SRI WAYUNI OKVITA SARI; HADIYANTO; YULIANTO SANTOSO

Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
ayuokvita30@gmail.com

Abstract: Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program Pendidikan diperlukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah wajib dikelola, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS. Dalam pengelolaan dana BOS terdapat aktivitas dari perencanaan pengelolaan dana bantuan sekolah (BOS), pelaksanaan pengelolaan dana BOS, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS.

Keywords: Pengelolaan, Bantuan Operasional Sekolah

PENDAHULUAN

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS (Mulyono, 2015:170).

Menurut “Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2012” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan

pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh stakeholder sekolah. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah

satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekadar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya partisipasi komite sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan keuangan sekolah.

PERMASALAHAN

Saat ini banyak yang belum mengetahui bagaimana pengelolaan BOS dimulai dari perencanaan, penggunaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Jadi artikel ini dibuat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan agar tidak adanya kekeliruan pada prakteknya nanti.

PEMBAHASAN

PENGERTIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

“BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar” (Kemendikbud, 2015: 2).

Jadi dapat dikatakan bahwa dana BOS adalah program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan biaya atau pendanaan

pendidikan non personalia kepada siswa tidak mampu dan meringankan siswa lainnya dan sebagai pelaksana program wajib belajar serta perluasan akses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan, karena hampir seluruh biaya kegiatan siswa dapat memanfaatkan dana BOS tersebut.

TUJUAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk; 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah; 2) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta (Kemendikbud, 2015: 3).

SASARAN PROGRAM BOS DAN BESAR BANTUAN

Sasaran program dana BOS yaitu semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) (Kemendikbud, 2015: 3).

Besarnya jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan

sekolah induk. Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan (Kemendikbud, 2015: 6) sebagai berikut; a) Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan memasang di papan pengumuman jumlah dana BOS yang diterima sekolah. b) Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima. c) Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

PROSEDUR DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Prosedur pelaksanaan dana BOS, diawali dengan proses pendataan pendidikan dasar. Tahapan pendataan data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan langkah awal penting untuk proses pengalokasian dana BOS dan penyaluran dana BOS. Prosedur kemudian adalah proses penetapan alokasi dana BOS, persiapan penyaluran dana BOS di daerah, penyaluran dana BOS, dan pengambilan dana BOS (Kemendikbud, 2015: 20).

Tahapan proses pendataan Dapodik yang tercantum dalam Kemendikbud tentang Petunjuk Teknis BOS tahun 2015 (2015: 20) adalah sebagai berikut; 1) Sekolah menggandakan (*fotocopy*) formulir data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) sesuai dengan kebutuhan. Biaya *fotocopy* formulir dapat dibayarkan dari dana BOS; 2) Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan; 3) Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi; 4) Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran data individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Kepala Sekolah menunjuk operator pendataan dengan menerbitkan surat tugas sebagai penanggung jawab di tingkat sekolah; 6) Tenaga operator sekolah memasukkan/meng-*update* data ke dalam

aplikasi pendataan yang telah disiapkan oleh Kemdikbud kemudian mengirim ke *server* Kemdikbud secara *online*; 7) Sekolah harus mem-*backup* secara lokal data yang telah di-*entri*; 8) Formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik/pendidik/tenagakependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit; 9) Melakukan *update* data secara reguler ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam 1 semester; 10) Data yang dikirim oleh sekolah akan dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk berbagai jenis program, misalnya alokasi BOS, tunjangan PTK, Kartu Indonesia Pintar, Rehab, dll; 11) Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai operasional penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang di-*input* sudah masuk ke dalam *server* Kemdikbud; 12) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang tidak memungkinkan melakukan pendataan sendiri.

Adapun ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOS sekolah adalah sebagai berikut; 1) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun; 2) Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun; 3) Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana

tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (Kemendikbud, 2015: 27).

PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Dalam proses perencanaan pengelolaan Dana BOS komponen yang terlibat di dalam pengelolaan dana BOS adalah Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara sekolah, sebagai dewan guru, dan Komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun RAKS oleh tim manajemen bos sekolah, guru, dan komite sekolah selanjutnya melibatkan beberapa stakeholder sekolah yakni pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah, dan mereka menjalankan perannya masing-masing yakni Tim Manajemen Bos, dewan guru, dan Komite sekolah.

Langkah-langkah penyusunan RAKS diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah dalam satu tahun, selanjutnya dibuat perencanaan anggaran selanjutnya tim mensosialisasikan kepada Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, selanjutnya RAKS dipajang di papan pengumuman sekolah sehingga semua warga sekolah bisa mengetahui anggarannya.

PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Penggunaan dana BOS yakni membiayai komponen kegiatan-kegiatan seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehab ringan sanitasi sekolah, pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP, (Kartu

Indonesia Pintar), pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan perangkat komputer (Kemendikbud, 2015: 28).

Dana BOS mengalokasikan penggunaan dana untuk pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, sekolah-sekolah penerima dana BOS di bantu untuk pembelian dan perbaikan fasilitas sarana prasarana untuk mencapai standar minimum pelayanan melalui pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan peralatan sekolah, dan pendayagunaan laboratorium dan bahan praktek. Sehingga, apabila sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Semakin lengkap fasilitas belajar, akan semakin mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang baik dapat memberikan kesan positif kepada siswa dan mutu sekolah menjadi lebih maju dan meningkat. Terlebih didukung dengan penggunaan dana BOS yang sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran maka dapat meningkatkan kualitas sekolah.

PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Efek dari anggaran sekolah pada hasil siswa adalah berbagai karakteristik sekolah mempengaruhi baik anggaran sekolah serta kinerja siswa, pengeluaran anggaran tidak

dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen dalam pendidikan.

Pembiayaan sekolah dasar dan menengah merupakan proses yang kompleks dengan beberapa tujuan: sistem keuangan sekolah berusaha untuk menyediakan sumber daya yang cukup sehingga semua anak memiliki kesempatan untuk belajar, tetapi pada saat yang sama, sumber daya harus digunakan seefisien mungkin. Pembuat kebijakan tidak selalu tahu cara terbaik untuk meningkatkan sistem keuangan sekolah mereka, meskipun pembiayaan merupakan bagian penting dari sistem pendidikan; tanpa sumber daya, sekolah tidak akan berfungsi.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Dalam pertanggung jawaban pengelolaan BOS ada beberapa buku yang harus dibuat dalam tata kelola BOS yaitu Buku kas umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak. Oleh karena bendahara harus memahami berbagai buku tersebut, jika tidak maka akan menimbulkan berbagai dampak yang kurang baik bagi sekolah. Selain itu sekolah juga harus membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan untuk keperluan monitoring dan audit, membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD, pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6).

Faktor yang mengarah pada tercapainya tujuan pengelolaan dana banyak yang belum tercapai antara lain : pertama aspek perencanaan, anggaran dana BOS yang diberikan kepada sekolah dirasa masih terlalu sedikit dibandingkan dengan besaran biaya operasional yang harus ditanggung oleh sekolah. Kedua aspek pelaksanaan, pada dasarnya seluruh penggunaan anggaran sudah sesuai dengan juklak/juknis akan tetapi minimnya

sosialisasi kepada orang tua menyebabkan banyak pihak yang salah paham masalah dana BOS.

KESIMPULAN

BOS adalah program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan biaya atau pendanaan pendidikan non personalia kepada siswa tidak mampu dan meringankan siswa lainnya dan sebagai pelaksana program wajib belajar serta perluasan akses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan, karena hampir seluruh biaya kegiatan siswa dapat memanfaatkan dana BOS tersebut.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Sasaran program dana BOS yaitu semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) (Kemendikbud, 2015: 3).

Prosedur pelaksanaan dana BOS, diawali dengan proses pendataan pendidikan dasar. Tahapan pendataan data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan langkah awal penting untuk proses pengalokasian dana BOS dan penyaluran dana BOS. Prosedur kemudian adalah proses penetapan alokasi dana BOS, persiapan penyaluran dana BOS di daerah, penyaluran dana BOS, dan pengambilan dana BOS (Kemendikbud, 2015: 20).

Komponen yang terlibat dalam penyusunan RAKS antara lain Kepala Sekolah, Bendahara sekolah, Dewan guru,

dan Komite sekolah. Langkah-langkah penyusunan RAKS diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah, perencanaan anggaran, mensosialisasi anggaran dan pemajangan RAKS. Pengambilan dana BOS dilakukan bendahara sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum di bank. Pengambilan dana dilakukan per triwulan. Uang yang sudah diambil dari Bank disimpan di kas sekolah oleh bendahara.

Pelaksanaan penggunaan dana BOS sesuai dengan 13 item tata kelola bos yang telah diatur oleh Pemerintah. Apabila anggaran dalam BOS tidak cukup padahal dana triwulan berikutnya belum cair maka bendahara BOS dengan persetujuan Kepala Sekolah meminjam kepada pihak ketiga seperti Koperasi sekolah.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS melalui proses pelaporan yang dilakukan oleh Bendahara sekolah. Pembuatan pelaporan dikerjakan bertahap setiap hari dibantu guru. Beberapa buku yang harus dibuat dalam tata kelola BOS yaitu Buku kas umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak.

SARAN

Dalam pengelolaan dana BOS sebaiknya lakukan dengan tepat proses pengelolaannya dan ikuti langkah-langkahnya dengan baik agar tidak terjadinya kesalahan saat mengelolaa dana BOS.

DAFTAR RUJUKANFitri, A. (2014).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1), 33–39.

Moyudan, S. D. N. N., & Moyudan, S. D. N. N. (2016). *PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH DASAR NEGERI KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN*

KOTA BUKITTINGGI, 4(2), 237–246.

Smp, D. I., Gombong, N., & Kebumen, K. (2016). *PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 2 GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN AJARAN 2015/2016*. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

(Moyudan & Moyudan, 2016)

(Fitri, 2014)

(Smp, Gombong, & Kebumen, 2016)